

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Foreign Direct Investment (FDI) memegang peran penting dalam perekonomian negara berkembang, termasuk di Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mahadiansar et al., 2021). Sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, Indonesia telah menjadi magnet bagi investor asing yang mencari peluang di pasar yang dinamis dan beragam ini. Sumber daya yang dimiliki Indonesia memerlukan beberapa pihak untuk melakukan kerja sama dengan pihak eksternal seperti negara berkembang lainnya dan para investor asing yang ingin menanamkan modalnya untuk berinvestasi di Indonesia. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing atau Kementerian Investasi Indonesia (BKPM 2018), realisasi investasi pada triwulan III 2018 adalah 173,8 triliun dengan 89,1 triliun untuk penanaman modal dalam negeri dan 84,7 triliun untuk penanaman modal asing. Dengan demikian, berdasarkan data yang ada investasi yang ada di Indonesia antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing memiliki jumlah investasi yang tidak jauh berbeda.

Indonesia sebagai negara berkembang yang memerlukan sumber investasi dari penanaman modal asing, pemerintah memiliki peran utama untuk mempromosikan keuntungan dengan beberapa insentif untuk masuknya modal investasi dari penanaman modal asing. Salah satu manfaat dari kebijakan insentif pajak untuk meningkatkan minat investasi asing di Indonesia

(Lavinia,2020). Jumlah investasi yang diberikan pihak asing kepada Indonesia dipengaruhi dengan pajak negara dan pajak atas penghasilan perusahaan yang diterapkan di Indonesia.

Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia dan sumber daya alam, tetapi Indonesia masih mengalami keterbatasan pada modal (Anggarani et al., 2015). Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong dan meningkatkan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Insentif pajak merupakan salah satu instrument yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk menarik investasi asing termasuk di Indonesia. Salah satu insentif pajak yang diberikan kepada para investor asing adalah *Tax holiday* yang memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak kepada investor asing dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam PMK No.35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang direvisi dengan PMK No. 150/PMK.010/2018 dengan memperhatikan ketentuan dari pengurangan pajak penghasilan badan. Selain itu bertambah satu industry pioneer yang dapat memperoleh fasilitas *Tax holiday*, yaitu industri yang berhubungan dengan *Digital Economy*. Pada saat ini peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan PMK 130/PMK.010/2020. Terdapat perbedaan skema insentif pajak yang diberikan pemerintah dengan adanya perubahan peraturan tersebut.

Pada Oktober 2020 ketika realisasi dari *Foreign Direct Investment* dengan pemanfaatan fasilitas *tax holiday* hanya ada tiga perusahaan yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* dengan nilai investasi 27,15 triliun (Bella &

Yudianto, 2021). Fasilitas ini diberikan oleh pemerintah Indonesia dengan persetujuan dan komitmen dari para investor untuk merealisasikan investasinya dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun sejak fasilitas *tax holiday* diterbitkan. Hal ini diberlakukan untuk memastikan investor untuk langsung merealisasikan investasinya.

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan terdapat 16 industri pionir yang bisa mengajukan fasilitas *tax holiday*. Industri tersebut adalah Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi, Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti *semiconductor wafer*, *backlight* untuk *Liquid Crystal Display* (LCD), *electrical driver*, atau *display*, Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin, Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri

pembuatan mesin-mesin manufaktur, Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga Listrik, Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor, Industri pembuatan komponen utama kapal, Industri pembuatan komponen utama kereta api, Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara, Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya, Infrastruktur ekonomi, dan Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan industri tersebut.

Industri di Indonesia yang dapat menerima fasilitas *tax holiday* sesuai dengan jumlah penanaman modal yang sudah ditentukan Peraturan Menteri Keuangan. Fasilitas *tax holiday* ini sudah diberikan kepada 35 wajib pajak meliputi enam belas wajib pajak infrastruktur ekonomi, tiga belas wajib pajak industri logam, dan enam wajib pajak dari industri kimia dengan rencana penanaman modal sebesar Rp 446,1 triliun yang akan menyerap 25.120 tenaga kerja (BPKP, 2019). Terkait dengan insentif pajak yang sudah diberikan kepada para investor berdasarkan skema baru dengan mengubah jangka waktu pengurangan pajak yang disesuaikan dengan nilai investasinya dan perubahan persentase 50-100 persen yang akan disesuaikan dengan jumlah investasinya antara Rp 500 miliar sampai dengan Rp 1 triliun berhasil meningkatkan nilai investasi di Indonesia. Selain faktor insentif pajak ini jika dilihat dari data Bank Dunia berdasarkan kemudahan melakukan bisnis di Indonesia peringkat

Indonesia di Dunia dan ASEAN akan mempengaruhi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan data World Bank 2020 terkait “*Ease of Doing Business Ranking*” di Dunia Indonesia berada pada peringkat 73 di Dunia dari 190 negara. Negara ASEAN yang menduduki peringkat 25 besar dunia adalah Singapura pada peringkat kedua dengan skor 86,2, Malaysia pada peringkat 12 dengan skor 81,5, dan Thailand pada peringkat 21 dengan skor 80,1.

Rank	Economy	DB score	Rank	Economy	DB score	Rank	Economy	DB score
1	New Zealand	86.8	65	Puerto Rico (U.S.)	70.1	128	Barbados	57.9
2	Singapore	86.2	66	Brunei Darussalam	70.1	129	Ecuador	57.7
3	Hong Kong SAR, China	85.3	67	Colombia	70.1	130	St. Vincent and the Grenadines	57.1
4	Denmark	85.3	68	Oman	70.0	131	Nigeria	56.9
5	Korea, Rep.	84.0	69	Uzbekistan	69.9	132	Niger	56.8
6	United States	84.0	70	Vietnam	69.8	133	Honduras	56.3
7	Georgia	83.7	71	Jamaica	69.7	134	Guyana	55.5
8	United Kingdom	83.5	72	Luxembourg	69.6	135	Belize	55.5
9	Norway	82.6	73	Indonesia	69.6	136	Solomon Islands	55.3
10	Sweden	82.0	74	Costa Rica	69.2	137	Cabo Verde	55.0
11	Lithuania	81.6	75	Jordan	69.0	138	Mozambique	55.0
12	Malaysia	81.5	76	Peru	68.7	139	St. Kitts and Nevis	54.6
13	Mauritius	81.5	77	Qatar	68.7	140	Zimbabwe	54.5
14	Australia	81.2	78	Tunisia	68.7	141	Tanzania	54.5
15	Taiwan, China	80.9	79	Greece	68.4	142	Nicaragua	54.4
16	United Arab Emirates	80.9	80	Kyrgyz Republic	67.8	143	Lebanon	54.3
17	North Macedonia	80.7	81	Mongolia	67.8	144	Cambodia	53.8
18	Estonia	80.6	82	Albania	67.7	145	Palau	53.7
19	Latvia	80.3	83	Kuwait	67.4	146	Grenada	53.4
20	Finland	80.2	84	South Africa	67.0	147	Maldives	53.3
21	Thailand	80.1	85	Zambia	66.9	148	Mali	52.9
22	Germany	79.7	86	Panama	66.6	149	Benin	52.4
23	Canada	79.6	87	Botswana	66.2	150	Bolivia	51.7
24	Ireland	79.6	88	Malta	66.1	151	Burkina Faso	51.4
25	Kazakhstan	79.6	89	Bhutan	66.0	152	Mauritania	51.1
26	Iceland	79.0	90	Bosnia and Herzegovina	65.4	153	Marshall Islands	50.9
27	Austria	78.7	91	El Salvador	65.3	154	Lao PDR	50.8
28	Russian Federation	78.2	92	San Marino	64.2	155	Gambia, The	50.3
29	Japan	78.0	93	St. Lucia	63.7	156	Guinea	49.4
30	Spain	77.9	94	Nepal	63.2	157	Algeria	48.6
31	China	77.9	95	Philippines	62.8	158	Micronesia, Fed. Sts.	48.1
32	France	76.8	96	Guatemala	62.6	159	Ethiopia	48.0
33	Turkey	76.8	97	Togo	62.3	160	Comoros	47.9
34	Azerbaijan	76.7	98	Samoa	62.1	161	Madagascar	47.7
35	Israel	76.7	99	Sri Lanka	61.8	162	Suriname	47.5
36	Switzerland	76.6	100	Seychelles	61.7	163	Sierra Leone	47.5
37	Slovenia	76.5	101	Uruguay	61.5	164	Kiribati	46.9
38	Rwanda	76.5	102	Fiji	61.5	165	Myanmar	46.8
39	Portugal	76.5	103	Tonga	61.4	166	Burundi	46.8
40	Poland	76.4	104	Namibia	61.4	167	Cameroon	46.1
41	Czech Republic	76.3	105	Trinidad and Tobago	61.3	168	Bangladesh	45.0
42	Netherlands	76.1	106	Tajikistan	61.3	169	Gabon	45.0
43	Bahrain	76.0	107	Vanuatu	61.1	170	São Tomé and Príncipe	45.0
44	Serbia	75.7	108	Pakistan	61.0	171	Sudan	44.8
45	Slovak Republic	75.6	109	Malawi	60.9	172	Iraq	44.7
46	Belgium	75.0	110	Côte d'Ivoire	60.7	173	Afghanistan	44.1
47	Armenia	74.5	111	Dominica	60.5	174	Guinea-Bissau	43.2
48	Moldova	74.4	112	Djibouti	60.5	175	Liberia	43.2
49	Belarus	74.3	113	Antigua and Barbuda	60.3	176	Syrian Arab Republic	42.0
50	Montenegro	73.8	114	Egypt, Arab Rep.	60.1	177	Angola	41.3
51	Croatia	73.6	115	Dominican Republic	60.0	178	Equatorial Guinea	41.1
52	Hungary	73.4	116	Uganda	60.0	179	Haiti	40.7
53	Morocco	73.4	117	West Bank and Gaza	60.0	180	Congo, Rep.	39.5
54	Cyprus	73.4	118	Ghana	60.0	181	Timor-Leste	39.4
55	Romania	73.3	119	Bahamas, The	59.9	182	Chad	36.9
56	Kenya	73.2	120	Papua New Guinea	59.8	183	Congo, Dem. Rep.	36.2
57	Kosovo	73.2	121	Eswatini	59.5	184	Central African Republic	35.6
58	Italy	72.9	122	Lesotho	59.4	185	South Sudan	34.6
59	Chile	72.6	123	Senegal	59.3	186	Libya	32.7
60	Mexico	72.4	124	Brazil	59.1	187	Yemen, Rep.	31.8
61	Bulgaria	72.0	125	Paraguay	59.1	188	Venezuela, RB	30.2
62	Saudi Arabia	71.6	126	Argentina	59.0	189	Eritrea	21.6
63	India	71.0	127	Iran, Islamic Rep.	58.5	190	Somalia	20.0
64	Ukraine	70.2						

Gambar 1.1 Ease of Doing Business Ranking Tahun 2020

Menurut (Bella & Yudianto, 2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa impementasi kebijakan *tax holiday* merupakan faktor yang signifikan

mempengaruhi secara positif terhadap perkembangan arus *Foreign Direct Investment* di Indonesia, akan tetapi PDB tidak memberikan efek yang signifikan terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment* di Indonesia. Nuraini, dkk (2015) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa kebijakan *Tax holiday* memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas investasi di Indonesia, tetapi Indonesia masih harus memberikan prioritas utamanya untuk pembangunan.. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, (Nuryani et al., 2022) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya, *Tax holiday* tidak berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung.

Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD 1998) dijelaskan ada juga faktor dari investasi asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) masuk ke dalam suatu negara dengan *market-seeking*, *resource-seeking*, dan *efficiency-seeking*. *Market-seeking* adalah cara para investor mencari peluang untuk mengikuti pasar di negara tujuan. Motivasi ini terjadi ketika pasar domestik investor tidak cukup besar atau tidak memiliki potensi yang cukup untuk meningkatkan pendapatan investor. Investor yang memiliki motivasi *market-seeking* akan mencari pasar baru di negara tujuan untuk memasarkan produk. *resource-seeking* merupakan cara investor mencari sumber daya yang tidak tersedia atau lebih murah di negara tujuan. Motivasi ini terjadi ketika investor mempunyai kebutuhan tertentu yang tidak tersedia di negara asal mereka, seperti bahan baku, tenaga kerja, atau infrastruktur. Investor yang memiliki motivasi *resource-seeking* akan mencari sumber daya yang dapat

memperkuat kekuatan kompetitifnya. *Efficiency-seeking* merupakan cara Investor mencari kemungkinan untuk mengoptimalisasi biaya dan kinerja operasionalnya. Motivasi ini terjadi ketika investor memiliki kebutuhan untuk mengurangi biaya produksi, mengoptimalkan proses produksi, atau mengintegrasikan operasi di berbagai lokasi. Investor yang memiliki motivasi *efficiency-seeking* akan mencari lokasi yang lebih murah, lebih efisien, atau lebih sesuai dengan kebutuhan mereka dan Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai potensi untuk investor asing menanamkan modalnya di Indonesia (Gorynia et al., 2007) . Berdasarkan kriteria tersebut masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan pemerintah saja, tetapi juga sumber daya yang ada di negara tujuan baik sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Penanaman modal asing yang akan diberikan kepada suatu negara tidak hanya membawa modal baru, tetapi juga teknologi, manajemen, dan lapangan kerja, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pada era globalisasi ini, investasi asing memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara. Indonesia, dengan sumber daya alam yang kaya dan populasi yang besar, menawarkan potensi pertumbuhan yang besar bagi investor asing. Investasi asing akan membantu mengisi kekurangan modal domestik, mempercepat transfer teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membuka peluang ekspor, yang semuanya membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) juga menjadi indikator penting bagi investor dalam menilai potensi dan stabilitas ekonomi suatu negara. Perubahan dinamis di pasar global dan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia, penting untuk memahami kontribusi berbagai faktor, termasuk kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi, terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan *Tax holiday* dan pertumbuhan PDB dalam menarik investasi asing ke Indonesia periode 2018-2022 yang dipengaruhi dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan dari Peraturan No.35 Tahun 2018 menjadi Peraturan No.130 Tahun 2020 terutama pada Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam, Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain, Industri Kimia Dan Farmasi, dan Konstruksi karena berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi/BKPM adanya jumlah investasi besar pada industri tersebut seperti masuknya investasi Hyundai, Pegatron Corporation, dan Shanghai Electric Group. Pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi investasi asing, diharapkan pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Pertumbuhan investasi langsung asing (FDI) di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah seperti *Tax holiday* dan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam konteks ini, penelitian ini

bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kebijakan *Tax holiday* serta PDB terhadap arus masuk FDI di Indonesia.

1. Apakah kebijakan *Tax holiday* memiliki pengaruh terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia?
2. Apakah Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia?
3. Bagaimana hubungan antara kebijakan *tax holiday* dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) memengaruhi *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan insentif pajak *Tax holiday* dan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap investasi langsung asing (FDI) di Indonesia. Dengan mendalaminya, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi arus masuk FDI serta implikasi kebijakan terkait insentif fiskal dalam memperkuat investasi asing di Indonesia.

1. Menganalisis kontribusi kebijakan *tax holiday* terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia.
3. Menganalisis hubungan antara kebijakan *tax holiday* dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam memengaruhi *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia.

4. Menganalisis dampak dari perubahan kebijakan *Tax holiday*, dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemerintah tentang efektivitas kebijakan *Tax holiday* dalam menarik FDI ke Indonesia, memungkinkan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kebijakan yang ada, dan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Analisis terhadap pemahaman tentang sejauh mana pertumbuhan PDB berkontribusi terhadap FDI dapat memberikan informasi yang berharga tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan investasi asing, membantu dalam merancang strategi pembangunan ekonomi yang lebih efektif.

Setelah dilakukannya analisis hubungan antara kebijakan *Tax holiday* dan pertumbuhan PDB dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi FDI di Indonesia dengan perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi akademik yang signifikan dengan mengisi celah pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi investasi asing di Indonesia, memberikan dasar untuk penelitian lanjutan dalam bidang ekonomi internasional dan kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki manfaat praktis bagi pengambil keputusan dan pelaku pasar, tetapi juga

memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang dinamika investasi asing di Indonesia.